

## **PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG PARTISIPATIF (Studi di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)**

**Em a Novithania<sup>1</sup>, Yahnu Wiguno Sanyoto<sup>2</sup>, Eva Susanti<sup>3</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Baturaja<sup>1,2,3</sup>

Corresponding Author: [emanovitania3345@gmail.com](mailto:emanovitania3345@gmail.com)<sup>1</sup>, [yahnu\\_ws@yahoo.com](mailto:yahnu_ws@yahoo.com)<sup>2</sup>, [evaefotos@gmail.com](mailto:evaefotos@gmail.com)<sup>3</sup>

---

### **Info Artikel**

**Submitted:** 30 April 2026

**Revised :** 02 Mei 2026

**Accepted:** 11 Mei 2026

**Published:** 23 Mei 2026

**Keywords:** Role, Village Community Empowerment Institution, Village Government, Participatory

**Kata Kunci:** Peran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintahan Desa, Partisipatif

---

### **Abstract**

*This study aims to analyze the role of the Village Community Empowerment Institution (LPM) in realizing participatory village governance in Tanjung Besar Village, Mekakau Ilir District, South Ogan Komering Ulu Regency. The study employed a qualitative method with a governmental science approach (Development Approach), with data collection techniques including interviews, observation, and documentation with the village government, Community Empowerment Institutions (LPM), hamlet heads, the community, and academics. The results indicate that the LPM's role has been effective, as seen from indicators such as expectations as a liaison between the village government and the community in encouraging participation, indicators of norms based on applicable regulations, although their implementation remains flexible, and indicators of behavioral manifestations seen in the LPM's involvement in deliberations, development, and mutual cooperation. However, the implementation of this role has not been optimal due to uneven distribution across the village. Regarding the assessment and sanctions indicator, evaluations have been conducted by the village government and community, but sanctions remain informal. This situation indicates that the LPM's role needs to be improved to ensure more optimal and equitable community participation in village governance.*

---

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ilmu pemerintahan (Pendekatan Pembangun), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah desa, LPM, kepala dusun, masyarakat, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LPM telah berjalan, ditinjau dari indikator harapan sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendorong partisipasi, indikator norma yang didasarkan pada aturan yang berlaku meskipun penerapannya masih fleksibel, serta indikator wujud perilaku yang terlihat dalam keterlibatan LPM pada musyawarah, pembangunan, dan gotong royong. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena belum merata di seluruh wilayah desa. Pada indikator penilaian dan sanksi, evaluasi telah dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, tetapi sanksi masih bersifat informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran LPM perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih*

---

*optimal dan merata.*

---



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

*Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara*

---

## **PENDAHULUAN**

Tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Partisipasi masyarakat diperlukan agar pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan desa yang partisipatif juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan didukung oleh lembaga kemasyarakatan desa, salah satunya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. LPM memiliki peran sebagai mitra pemerintah desa dalam membantu perencanaan, pelaksanaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Keberadaan LPM diharapkan mampu menjadi penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat meningkat.

Pelaksanaan peran LPM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif masih menghadapi berbagai kendala. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa belum optimal dan cenderung bersifat pasif. Masyarakat lebih banyak terlibat pada tahap pelaksanaan kegiatan dibandingkan dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa masih cenderung bersifat top down.

Permasalahan tersebut terlihat di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Keberadaan LPM di desa tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan juga belum sepenuhnya merata sehingga partisipasi masyarakat pada setiap wilayah dusun masih berbeda-beda.

Penelitian ini menggunakan teori peran menurut *Biddle and Thomas* yang terdiri dari indikator *expectation, norm, performance, evaluation, dan sanction*. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis peran LPM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

## **METODELOGI**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan (Ilmu Pemerintahan) Pembangunan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya permasalahan terkait partisipasi masyarakat dan pelaksanaan peran LPM dalam kegiatan pembangunan desa.

Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Informan dalam penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPM, Kepala Dusun, masyarakat desa, dan akademisi. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap pelaksanaan peran LPM dalam kegiatan desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan mengenai pelaksanaan peran LPM. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi dan pelaksanaan kegiatan desa secara langsung. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa arsip, foto, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber untuk membandingkan informasi dari setiap informan sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah berjalan dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif. Keterlibatan LPM terlihat dalam kegiatan musyawarah desa, gotong royong, serta pembangunan desa. Kehadiran LPM dinilai membantu pemerintah desa dalam mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan desa.

**PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM TATA KELOLA  
PEMERINTAHAN DESA YANG PARTISIPATIF (Studi di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau  
Iilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)**

*Ema Novithania<sup>1</sup>, Yahnu Wiguno Sanyoto<sup>2</sup>, Eva Susanti<sup>3</sup>*

Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua LPM menjelaskan bahwa LPM memiliki peran sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat. Peran tersebut terlihat melalui keterlibatan LPM dalam menyampaikan informasi kegiatan desa, mengajak masyarakat mengikuti musyawarah, serta membantu pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat Dusun 1 dan Dusun 2 juga menyampaikan bahwa keberadaan LPM cukup membantu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama pada kegiatan gotong royong dan pembangunan desa.

Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa LPM telah menjalankan fungsi sosial dalam masyarakat desa. Teori peran menurut *Biddle and Thomas* menjelaskan bahwa suatu peran muncul karena adanya harapan dari lingkungan sosial terhadap individu atau lembaga tertentu. Harapan masyarakat dan pemerintah desa terhadap LPM menunjukkan bahwa lembaga tersebut memiliki posisi penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Peran LPM juga terlihat melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan desa. Ketua LPM menjelaskan bahwa komunikasi dengan masyarakat dilakukan secara langsung melalui pendekatan personal dan ajakan dalam kegiatan desa. Kepala Dusun juga menyampaikan bahwa LPM membantu menggerakkan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran LPM tidak hanya bersifat formal, tetapi juga terlihat melalui tindakan nyata di lingkungan masyarakat. Teori *Biddle and Thomas* menjelaskan bahwa peran dapat dilihat dari perilaku atau tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sosial. Keterlibatan LPM dalam musyawarah desa, gotong royong, dan pembangunan desa menunjukkan adanya bentuk nyata pelaksanaan peran dalam tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif.

Keberadaan aturan dari pemerintah dan peraturan desa juga menjadi dasar dalam pelaksanaan peran LPM. Pemerintah desa dan LPM menjelaskan bahwa aturan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kegiatan desa. Norma tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan peran LPM telah memiliki dasar yang jelas dalam pemerintahan desa.

Pelaksanaan peran LPM di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal. Kepala Dusun 3 dan masyarakat Dusun 3 menyampaikan bahwa pembangunan pada wilayah mereka belum merata sehingga peran LPM masih kurang dirasakan. Partisipasi masyarakat pada beberapa wilayah juga masih rendah dibandingkan dusun lainnya.

Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat keaktifan LPM mempengaruhi

**PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM TATA KELOLA  
PEMERINTAHAN DESA YANG PARTISIPATIF (Studi di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau  
Iilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)**

*Ema Novithania<sup>1</sup>, Yahnu Wiguno Sanyoto<sup>2</sup>, Eva Susanti<sup>3</sup>*

tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa. Semakin aktif komunikasi dan pendekatan yang dilakukan LPM, maka keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa juga semakin meningkat. Kurangnya pemerataan pembangunan menyebabkan partisipasi masyarakat pada beberapa wilayah menjadi berbeda.

Penilaian terhadap kinerja LPM dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat melalui rapat maupun musyawarah desa. Penilaian dilakukan berdasarkan tingkat keaktifan dan keterlibatan LPM dalam kegiatan desa. Bentuk tindak lanjut yang diberikan lebih banyak berupa pembinaan dan teguran apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara teori peran dengan kondisi di lapangan. Harapan masyarakat terhadap LPM, keberadaan aturan dalam menjalankan tugas, tindakan nyata dalam kegiatan desa, serta adanya penilaian terhadap kinerja LPM menunjukkan bahwa peran LPM telah berjalan dalam tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif. Peran tersebut masih memerlukan peningkatan, terutama dalam pemerataan kegiatan pembangunan dan peningkatan partisipasi masyarakat pada seluruh wilayah desa.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah berjalan, namun belum optimal. LPM telah berperan sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat melalui keterlibatan dalam kegiatan musyawarah desa, gotong royong, dan pembangunan desa.

Peran LPM terlihat dari upaya mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan desa melalui komunikasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat. Keberadaan aturan dari pemerintah dan peraturan desa juga menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi LPM dalam pembangunan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada setiap dusun masih berbeda. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingkat keaktifan LPM serta belum meratanya pelaksanaan pembangunan desa. Penilaian terhadap kinerja LPM dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat melalui rapat maupun musyawarah desa, sedangkan tindak lanjut yang diberikan lebih banyak berupa pembinaan dan teguran.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran LPM dalam tata kelola pemerintahan desa yang

**PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM TATA KELOLA  
PEMERINTAHAN DESA YANG PARTISIPATIF (Studi di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau  
Iilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)**

*Ema Novithania<sup>1</sup>, Yahnu Wiguno Sanyoto<sup>2</sup>, Eva Susanti<sup>3</sup>*

partisipatif masih perlu ditingkatkan, terutama dalam meningkatkan keaktifan, pemerataan pembangunan, dan keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, Isbandi Rukminto. (2018). *Intervensi komunitas dan pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwiyanto, Agus. 2016. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mardikanto, Totok. (2017). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rauf, Rahyuni, & Munaf, Yusri. (2015). *Lembaga kemasyarakatan di Indonesia*. Yogyakarta: Zanafa Publishing.
- Riyadi, & Bratakusumah, Deddy Supriady. (2013). *Perencanaan pembangunan daerah: Strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sanyoto, Yahnu Wiguno, 2020. *Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2014. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Edisi revisi, cet. ke-17. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian, Sondang P. (2012). *Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi, dan strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (2013). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.